

LIKUIDASI BANK

Dosen :

Munawar Kholil, SH., M.Hum.

Pengertian Likuidasi Bank

- Likuidasi Bank adalah proses hukum penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pembubaran badan hukum bank.
- Pembubaran Badan Hukum Bank adalah suatu keputusan yang menetapkan berakhirnya kedudukan bank sebagai suatu badan hukum.
- Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- Pengurus Bank adalah Direksi dan Dewan Komisaris bagi bank yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang dipersamakan dengan itu bagi bank yang berbentuk hukum koperasi atau perusahaan daerah, atau pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan diluar negeri.

Lanjutan ...

- Likuidasi bank merupakan salah satu instrumen pembinaan di dalam dunia perbankan agar sektor perbankan dapat tetap menjalankan fungsinya secara dinamis dan mandiri.
- Likuidasi bank harus tetap menjamin terpeliharanya hak para pihak terkait, khususnya nasabah penyimpan dana.
- Pelaksanaan likuidasi harus dilakukan oleh suatu tim yang professional yang beranggotakan berbagai unsur yang terkait dengan aktifitas perbankan sehingga kepentingan berbagai pihak dapat terwakili dan terpelihara.
- Bank Indonesia bertindak sebagai pengawas pelaksanaan likuidasi.

Mengapa Prosedur Khusus?

- Likuidasi perusahaan yang bernama “bank” diatur prosedur di luar ketentuan kepailitan yang ada, karena karakteristik bank memang jauh berbeda dengan perusahaan biasa.
- Hal tersebut misalnya dapat dilihat bahwa bank merupakan lembaga kepercayaan, karena bank dapat bekerja atas dasar kepercayaan nasabah/masyarakat, sehingga kaidah kepailitan (Pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan) tidak dapat diterapkan karena dapat menggoyahkan kepercayaan masyarakat.
- Dari segi asset, asset perbankan adalah dana masyarakat, sementara porsi modal bank tersebut relatif kecil bila dibandingkan dengan aset secara keseluruhan. Operasional bank mempunyai resiko sistemik, dalam arti kejatuhan pada suatu bank dapat menyebabkan kejatuhan bank lain, yang pada akhirnya akan menghancurkan sistem yang telah dibangun. Oleh sebab itu terhadap bank perlu diatur prosedur yang sangat khusus untuk ‘pembubarannya’

Likuidasi Bank vs Kepailitan

- Dalam Pasal 1 ayat (3) UU Kepailitan memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk memohonkan pailit terhadap suatu bank debitur, namun dalam praktiknya pasal ini tidak pernah digunakan. Alasan yang paling mendasar mengenai tidak digunakannya pasal ini oleh Bank Indonesia adalah karena usaha bank memiliki karakteristik kegiatan usaha yang berbeda dari perusahaan pada umumnya, yaitu sebagai *intermediary institution*, sehingga aset bank pada dasarnya adalah milik para deposan selain juga milik kreditur bank lainnya.

Lanjutan ...

- Selain itu mengingat bank adalah usaha yang hanya dapat berjalan atas dasar kepercayaan masyarakat, sehingga usaha bank harus dilindungi dari kemungkinan tindakan kreditur tertentu untuk serta merta mengajukan gugatan pailit ke Pengadilan. Oleh karena itu UU Kepailitan dapat membatasi pihak yang boleh mengajukan gugatan kepailitan terhadap bank melalui debitur, yaitu Bank Indonesia (selaku otoritas perbankan). Namun, mengingat karakteristik usaha bank sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap bank yang mengalami permasalahan keuangan, pertama-tama dilakukan upaya penyelamatan. Apabila upaya penyelamatan itu tidak berhasil, sementara permasalahan yang dihadapi bank itu mengganggu usahanya atau sistem perbankan, maka bank bermasalah itu harus keluar dari sistem perbankan (*exit policy*) melalui proses likuidasi bank sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 37 UU Perbankan dan bukan melalui proses kepailitan sebagaimana disediakan jalannya oleh pasal 1 ayat (3) UU Kepailitan.

Akibat Hukum Likuidasi Bank

- Bank yang sudah dilikuidasi dianggap sudah tidak eksis lagi, oleh karena itu tidak berhak melakukan kegiatan hukum seperti membayar utang, dsb. Ini berbeda dengan proses kepailitan. Perusahaan yang dipailitkan wajib melakukan proses kepailitan. Perusahaan yang dipailitkan wajib melakukan proses rehabilitasi sehingga perusahaan itu tetap eksis. Kepailitan tidak menyebabkan matinya suatu PT, tetapi hanya berakibat terhadap ketidak mampuan perusahaan itu untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta kekayaan RUPS perusahaan tetap eksis/aktif aktif, namun diwakili oleh kurator. Dalam proses rehabilitasi ternyata perusahaan tersebut mampu survive, maka perusahaan tersebut dapat berubah statusnya menjadi perusahaan biasa lagi yang tidak di bawah pngampuan.

STATUS DEBITUR

- Status debitur setelah selesainya tindakan pemberesan, UU Kepailitan menyatakan bahwa setelah tindakan pemberesan selesai dilakukan debitur yang berbentuk badan hukum tidak bubar. Bubarnya perusahaan yang berbentuk badan hukum hanya terjadi apabila memang dengan sengaja dibubarkan, bagi perusahaan yang berbentuk PT maka pembubarannya mengikuti ketentuan UU PT. Dalam hal setelah tindakan pemberesan ternyata utang-utang debitur kepada kreditur masih tersisa atau belum lunas seluruhnya maka debitur tetap berkewajiban untuk melunasi utang itu. Para kreditur memperoleh kembali hak mereka untuk menagih dan memperoleh pembayaran atas piutang mereka yang belum dilunasi oleh debitur (Pasal 190). Sebagai konsekuensinya, apabila debitur memulai kembali untuk berbisnis setiap pendapatan yang diperolehnya dari bisnisnya itu harus dipakai untuk membayar utang-utang yang belum lunas. Sebaliknya apabila debitur tsb tidak lagi menjalankan kegiatan usahanya, sehingga dengan demikian tidak memperoleh pendapatan sebagai sumber pelunasan utang-utangnya maka hanya lewatnya masa kadaluwarsa yaitu setelah lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun sejak terakhir debitur ditagih oleh krediturnya yang dapat membebaskan debitur dari kewajiban membayar utang-utangnya.

Peraturan Per-UU Likuidasi Bank

- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Salah satu bentuk badan hukum bank adalah Perseroan Terbatas (PT), dengan demikian ketentuan UUPT yang berhubungan dengan bank, khususnya hal yang mengatur tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi dan komisaris, serta pembubaran perseroan dan likuidasi.
- UU Nomor No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (LN tahun 1992 No. 31, TLN No. 3472), sebagaimana telah diubah Dengan UU No. 10 Tahun 1998 (LN tahun 1998 No. 182, TLN No. 3790). Khususnya Pasal 37 ayat (2) yang mengatur mengenai pencabutan ijin usaha bank oleh Bank Indonesia , pembubaran badan hukum bank oleh RUPS, dan pembentukan tim likuidasi, dan ayat (3) yang mengatur tentang penetapan pengadilan atas permintaan otoritas perbankan, dalam hal ini Bank Indonesia yang berisi pembubaran badan hukum bank, bilamana tidak terselenggaranya RUPS, penunjukan tim likuidasi dan perintah pelaksanaan likuidasi.

Lanjutan ...

- **UU No. 24 Tahun 2004** ttg Lembaga Penjamin Simpanan. Khususnya Psl 4 s/d 7 (fungsi, tugas & kewenangan); Psl 21 s/d 61 (masalah penanganan Bank Gagal dan Likuidasi).
- Undang Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.
- Undang Undang No. 5 tahun 1962 tentang Perusda.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank (LN tahun 1999 No. 52, TLN No. 3831). Tujuan dari diundangkannya PP No. 25 tahun 1999 ini adalah agar segala tata cara/prosedur dari pelaksanaan likuidasi bank dapat dilakukan dengan lebih efisien dan sebagai penyempurnaan dari ketentuan yang mengatur tentang pencabutan izin usaha, pembubaran, dan likuidasi bank yang telah ada.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/53/Kep Dir/1999 bertanggal 14 Mei 1999 tentang tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Guna melengkapi PP No. 25 tahun 1999, maka perlu dilakukan penyesuaian ketentuan tentang tata cara pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank.

Lanjutan ...

- Keppres No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum (LN No. 29 tahun 1998). Akibat krisis moneter yang berat menimpa Indonesia yang berakibat merosotnya kepercayaan masyarakat pada nilai mata uang rupiah dan dunia perbankan nasional maka Pemerintah memberikan jaminan terhadap seluruh kewajiban pembayaran bank umum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia (*blanket guarantee*). Di gantikan sekarang dengan Lembaga Penjamin Simpanan berdasar **UU No. 24 Tahun 2004.**
- Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 179/KMK.017/2000, bertanggal 26 Mei 2000 tentang Syarat, Tata Cara dan Ketentuan Pelaksanaan jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

Masalah dlm Likuidasi Bank

- Dalam hal terjadi likuidasi bank, nasabah penyimpan dan kreditur lainnya berada dalam posisi yang lemah. Berbeda dengan perjanjian kredit yang lebih menjamin posisi bank sebagai kreditur, karena debitur wajib menyerahkan jaminan, sehingga apabila debitur wanprestasi, bank memiliki kepastian hukum bahwa dana yang dipinjamkannya akan kembali. Sedangkan dalam hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan, ketika nasabah menyimpan sejumlah dananya pada bank, bank tidak menyerahkan jaminan yang dapat memberi kepastian kepada nasabah bahwa dana yang disimpannya pasti dapat diterima kembali, bahkan oleh hukum nasabah bank yang dianggap harus menanggung risiko hilangnya sebagian dana yang disimpan di bank yang ia pilih. Demikian pula kedudukan kreditur bank yang bukan merupakan kreditur *preferent*;
- Perlu dipikirkan sarana pengganti dari Program Penjaminan Pemerintah yang mungkin dijadikan sistem yang permanen dalam membangun sistem perbankan yang sehat dan kuat.

Lanjutan

- Likuidasi bank terjadi antara lain karena kelalaian maupun kurangnya kepatuhan pengurus bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Kinerja Tim Likuidasi belum memperlihatkan efektifitas seperti yang diharapkan untuk menuntaskan proses likuidasi bank yang disebabkan karena beberapa hal antara lain ketentuan tentang likuidasi bank yang belum sempurna, peraturan yang belum lengkap, misalnya dalam hal eksekusi asset bank terlikuidasi, dalam hal pembuktian, masalah asset atas nama pihak lain dan lain sebagainya
- Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya pencabutan izin usaha bank belum sepenuhnya efektif.

Lanjutan ...

- Buruknya sistem administrasi Bank Dalam Likuidasi ;
- Banyaknya kesulitan dalam optimalisasi penjualan asset Bank Dalam Likuidasi baik secara langsung maupun dengan mekanisme lelang;
- Penagihan kepada debitur Bank Dalam Likuidasi yang terlaksana tidak maksimal
- Kesulitan dalam penentuan harga jual asset Bank Dalam Likuidasi ;
- Tidak ada kejelasan mengenai pengelolaan sertifikat asset Bank Dalam Likuidasi .

Pencabutan Izin Usaha Bank

- Perizinan merupakan sub yang sangat penting dalam pembangunan sistem perbankan yang sehat dan kuat, karena perizinan merupakan salah satu sarana untuk menyeleksi agar hanya badan hukum yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang dapat menjalankan usaha perbankan. Disamping itu, perizinan juga digunakan oleh otoritas perbankan sebagai alat untuk memaksa bank untuk mematuhi segala ketentuan dari otoritas perbankan dengan ancaman pencabutan izin usaha bila terjadi pelanggaran dan penyimpangan dalam pengelolaan bank.
- Pencabutan izin usaha Bank dilakukan oleh Pimpinan Bank Indonesia apabila tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Perbankan) belum cukup mengatasi kesulitan yang dihadapi Bank, atau menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu Bank dapat membahayakan sistem perbankan atau terdapat permintaan dari pemilik atau pemegang saham Bank atau bank melanggar peraturan perundang-undangan.

Lanjutan ...

- Pencabutan izin usaha Kantor Cabang dari Bank Yang Berkedudukan di Luar Negeri dapat dilakukan oleh Bank Indonesia apabila memenuhi alasan sebagaimana diuraikan di atas atau terdapat permintaan kantor pusat Bank Yang Berkedudukan di Luar Negeri atau izin usaha kantor pusat Bank Yang Berkedudukan di Luar Negeri dicabut dan/atau kantor pusat dimaksud likuidasi oleh otoritas yang berwenang di negara setempat.

Tindakan Otoritas Perbankan

- Jika menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan usahanya, Pimpinan Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar:
 - a) Pemegang saham menambah modal;
 - b) Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan/atau direksi bank;
 - c) Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
 - d) Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan Bank lain;
 - e) Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
 - f) Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank kepada pihak lain;
 - g) Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban bank kepada pihak lain;

Akibat Hukum Pencabutan Ijin Usaha Bank

- Apabila tindakan penyelamatan belum cukup, untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi Bank dan/atau menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu Bank dapat membahayakan sistem perbankan, Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk Tim Likuidasi.
- Konsekuensi dari pencabutan izin usaha tersebut adalah bank wajib menutup seluruh kantor-kantornya untuk umum dan menghentikan segala kegiatan perbankan dan membubarkan badan hukum bank tersebut. Berkenaan dengan itu bank harus berupaya mengembalikan dana masyarakat yang telah dipercayakan untuk disimpan pada bank tsb maupun dana kreditur lainnya kepada yang berhak. Sebaliknya debitur bank harus segera menyelesaikan kewajibannya untuk membayar kembali kepada bank agar piutang bank tsb segera masuk ke dalam *boedel*.

Lanjutan ...

- Proses penyelesaian hak dan kewajiban antara bank dan nasabah penyimpan atau kreditur lainnya ini memerlukan kerangka hukum yang dapat menjamin kepentingan semua pihak terkait, terutama mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dan kreditur lainnya. Proses penyelesaian hak dan kewajiban bank likuidasi ini harus dapat dilaksanakan dengan hati-hati, cermat dan tuntas. Dengan demikian pada saat berakhirnya likuidasi dan dilakukannya pembubaran badan hukum bank seluruh kewajiban Bank Dalam Likuidasi telah diselesaikan.

Likuidasi Bank karena Penetapan Pengadilan (RUPS tidak dapat diselenggarakan)

- Apabila Direksi Bank tidak bersedia menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk pembubaran bank tsb, maka proses likuidasi badan hukum bank tidak dapat dimulai. Sehubungan dengan hal ini Pasal 37 ayat (3) yang selanjutnya disebut UU Perbankan mengatur bahwa bila hal ini terjadi, Pimpinan Bank Indonesia meminta Pengadilan di tempat kedudukan kantor pusat bank untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan Tim Likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

■

Lanjutan ...

- Namun demikian terdapat pemikiran untuk melibatkan pengadilan Niaga dalam terjadi likuidasi bank. Kewenangan Pengadilan Niaga untuk membuat penetapan pembubaran badan hukum bank didasarkan pada pertimbangan bahwa sub sistem pengadilan ini mempunyai keahlian yang spesifik dalam bidang bisnis dibandingkan Pengadilan Negeri. Namun demikian penggunaan Pengadilan Niaga untuk penetapan likuidasi juga mempunyai hambatan antara lain :
 - 1). Pengadilan Niaga saat ini baru ada di Jakarta
 - 2). Mengingat penetapan pengadilan berfungsi sebagai pengganti RUPS, maka permintaan diajukan kepada pengadilan di tempat kedudukan kantor pusat bank (Pasal 64 UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT). Apabila tidak terdapat Pengadilan Niaga di tempat kedudukan kantor pusat bank yang dilikuidasi, bagaimana kekuatan yuridis terhadap keputusan Pengadilan Niaga di luar wilayah tempat kedudukan kantor pusat bank.

Likuidasi Bank Secara Sukarela (*self liquidation*)

- Suatu bank dapat mengakhiri kedudukannya sebagai suatu badan hukum secara sukarela (voluntary dissolution). Apabila suatu bank yang dalam operasionalnya tidak mengalami kesulitan yang *significant*, dapat saja membubarkan diri. Hal ini dimungkinkan oleh Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Pembubaran secara sukarela dapat terjadi apabila para pemiliknya menganggap cita-cita yang ada pada saat didirikannya bank tersebut telah tercapai, atau para pemiliknya ingin mengalihkan dananya untuk kegiatan bisnis lain. Pertimbangan bisnis atau finansial dapat pula menjadi alasan pembubaran suatu bank, jika direksi dan atau pemilik memprediksi bank tersebut akan mengalami kemunduran atau bahkan menjadi *insolvent* di kemudian hari.
- Dasar yang menjadi pertimbangan untuk pembubaran bank secara sukarela dengan demikian sangat subjektif. Pembubaran dengan cara demikian bukan karena sanksi yang terkait dengan tidak terpenuhinya persyaratan tertentu dari otoritas perbankan.

Lanjutan ...

- Mengingat kegiatan usaha bank banyak terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, maka untuk menjaga integritas sistem perbankan, walaupun *the existing law* memberikan peluang bagi suatu bank untuk membubarkan badan hukumnya, namun keinginan pemilik bank untuk membubarkan diri harus disikapi dengan cermat.
- Syarat utama dari pembubaran badan hukum bank secara sukarela adalah bahwa Bank yang bersangkutan tidak diperkenankan merugikan kreditur dan nasabah penyimpan lainnya yang telah mempercayakan dananya pada bank tersebut. Peluang yang diberikan oleh perundang-undangan yang ada untuk pembubaran badan hukum secara sukarela tidak boleh dijadikan *loop hole* oleh pemilik bank, pengurus, maupun pihak terkait untuk melepaskan diri dari tanggung jawabnya terhadap kepercayaan nasabah penyimpan dan kreditur lainnya.

Lanjutan ...

- Selain itu, pembubaran badan hukum bank secara sukarela harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bank Indonesia . Apabila secara prinsip disetujui, Bank Indonesia mewajibkan bank tersebut untuk terlebih dahulu mengembalikan dana-dana nasabah penyimpan dan kreditur lainnya, setelah itu barulah diikuti dengan proses pencabutan izin usaha dan likuidasi.
- Sedangkan pencabutan izin usaha yang dilakukan secara sukarela (*self liquidation*) bagi Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri hanya dapat diberikan apabila Bank atau Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan di Luar Negeri yang bersangkutan telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh Kreditur atau menyediakan dana sekurang-kurangnya sebesar kewajiban Bank atau Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri yang belum diselesaikan.

Pembubaran Badan Hukum Bank

- Berbeda dengan pembubaran dan likuidasi perusahaan pada umumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 115 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (sekarang lihat UU No. 40 Th 2007 ttg PT) yang mengatur bahwa perseroan bubar pada saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS, kemudian diikuti dengan likuidasi oleh likuidator, pasal 37 UU Perbankan mengatur bahwa bank yang dicabut izin usahanya oleh otoritas perbankan diikuti dengan penyelenggaraan RUPS, pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi.
- Berdasarkan ketentuan yang berlaku dewasa ini (vide Pasal 21 PP No. 25 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Likuidasi Bank), status badan hukum bank hapus sejak tanggal pengumuman berakhirnya likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan pasal 20 ayat (2) PP No. 25 Tahun 1999. Sedangkan keputusan dan penetapan pembubaran badan hukum bank wajib didaftarkan dalam daftar Perusahaan dan di Panitera Pengadilan Negeri yang meliputi tempat kedudukan bank yang bersangkutan, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, diberitahukan kepada instansi yang berwenang oleh Tim Likuidasi dalam jangka waktu tertentu (7 hari) terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi (Pasal 8 PP No. 25 Tahun 1999).

Lanjutan ...

- Ketentuan ini perlu untuk dipertahankan mengingat sejak adanya keputusan RUPS atau ketetapan Pengadilan tentang pembubaran badan hukum bank, diperlukan waktu dan proses likuidasi bank. Oleh karena itu penetapan tanggal terjadinya pembubaran bank, mulai berlaku sejak tanggal pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia tentang berakhirnya likuidasi bank.

Pembekuan harta kekayaan Bank Dalam Likuidasi

- Penetapan status kekayaan Bank Dalam Likuidasi dalam *boedel* penting artinya untuk melindungi *boedel* dari perbuatan hukum yang dapat merugikan *boedel*. Berhubung dengan itu, ketika suatu bank ditetapkan sebagai Bank Dalam Likuidasi, demi hukum harta kekayaan bank tersebut berada dalam status beku. Siapapun tidak berhak untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut harta tersebut. Demikian juga dengan pengurus (Direksi dan Komisaris) diwajibkan menjaga agar harta itu tetap utuh serta melakukan inventarisasi. Setelah Tim Likuidasi terbentuk maka *boedel* dari daftar inventarisasi yang disusun oleh pengurus Bank Dalam Likuidasi diserahkan kepada Tim Likuidasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka tanggung jawab pengurus bank terhadap *boedel* bank perlu diatur secara rinci.

Lanjutan ...

- Disamping itu, untuk mengamankan *boedel* perlu ditetapkan pula adanya suatu jangka waktu tertentu bagi pemberlakuan hak untuk membatalkan transaksi-transaksi yang dibuat oleh pengurus Bank Dalam Likuidasi yang patut diduga dapat merugikan *boedel* (*actio pauliana*). Sebagai padanannya dalam peraturan kepailitan, *acutio pauliana* dilakukan oleh Tim Likuidasi.

Pengecualian dari *boedel* harta Bank Dalam Likuidasi

- Harta yang dikecualikan dari *boedel* Bank Dalam Likuidasi adalah harta yang tercatat di Bank Dalam Likuidasi sebagai titipan atau karena kedudukan bank sebagai kustodian. Harta kekayaan tersebut wajib dipisahkan dari harta kekayaan Bank Dalam Likuidasi dan wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak selesainya inventarisasi kekayaan dan kewajiban Bank Dalam Likuidasi .
- Kegiatan penitipan meliputi penyediaan tempat untuk menyimpan barang berupa *safe deposit box*, sedangkan kegiatan kustodian merupakan kegiatan penitipan dana atau surat berharga untuk kepentingan nasabah berdasarkan suatu perjanjian.
- Dalam hal pengembalian harta kekayaan karena alasan sah tidak dapat dilaksanakan, Tim Likuidasi wajib menitipkan harta kekayaan pada Bank lain dengan persetujuan Otoritas Pengawas.
-

Tanggung Jawab Direksi Bank thd Harta Kekayaan Bank dlm Likuidasi

- Berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini disebutkan bahwa apabila bank telah dicabut izin usahanya maka dinyatakan sebagai Bank Dalam Likuidasi . Bank Dalam Likuidasi wajib menutup seluruh kantor-kantornya untuk umum dan menghentikan segala kegiatan perbankan. Sejak tanggal pencabutan izin usaha, Pengurus Bank dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan pengalihan asset dan kewajiban bank, kecuali atas persetujuan dan/atau penugasan Otoritas Pengawas, sedangkan untuk kepentingan pembayaran gaji pegawai yang terutang, pembayaran biaya kantor, serta kewajiban Bank kepada nasabah penyimpan dana dengan menggunakan dana lembaga penjamin simpanan.
- Setelah izin usaha dicabut Direksi Bank wajib menyusun Neraca Penutupan yang belum diaudit, mempersiapkan calon anggota TimLikuidasi untuk mendapat persetujuan Otoritas Pengawas sebelum diajukan kepada RUPS, mempersiapkan pemutusan hubungan kerja dengan pegawai dan menyelenggarakan RUPS, kecuali bagi Kantor Cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri.

Pembentukan Tim Likuidasi

- Tujuan utama pembentukan Tim Likuidasi adalah menginventarisasi seluruh hak dan kewajiban bank, serta menguasai semua aset Bank Dalam Likuidasi untuk keperluan pelunasan seluruh kewajiban bank terhadap nasabah penyimpan dana krediturnya, serta membagikannya kepada pemegang saham bank jika masih terdapat sisa harta kekayaan Bank Dalam Likuidasi. Hal ini pula yang menjadi fungsi pokok Tim Likuidasi, karena baik secara teoritis maupun dalam tatanan hukum positif hanyalah likuidator yang mempunyai kewenangan untuk hal tersebut.
- Kewenangan Tim Likuidasi dapat diperoleh dari undang-undang (*legislative enactment*) dan dapat diperoleh pula karena merupakan pengurus badan hukum Bank Dalam Likuidasi. Oleh karena itu tata cara pembentukan dan kewenangan Tim Likuidasi perlu dinyatakan secara tegas dalam Rancangan Undang-Undang Likuidasi Bank. Pemikiran ini tidak menghilangkan kewenangan badan hukum bank untuk membentuk Tim Pemberes, apabila likuidasi dan pembubaran badan hukum yang menjalankan usaha bank dilakukan secara sukarela.;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam RUU Likuidasi dapat dirumuskan bahwa pembentukan Tim Likuidasi dilakukan berdasarkan:
 - 1) Keputusan RUPS dengan persetujuan Bank Indonesia
 - 2).Penetapan Pengadilan Niaga atas permohonan Bank Indonesia .

Keanggotaan Tim Likuidasi

- Berdasarkan ketentuan mengenai likuidasi bank saat ini, ketentuan mengenai keanggotaan Tim Likuidasi diatur sebagai berikut :
 - Anggota Tim Likuidasi dapat terdiri dari pihak lain yang bukan pengurus bank atau pemegang saham; campuran antara pihak lain dengan satu atau dua orang yang mewakili Pengurus Bank dan/atau pemegang saham, sepanjang wakil Pengurus Bank dan pemegang saham tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah anggota Tim Likuidasi ; atau pengurus Bank dan atau pemegang saham sepanjang Likuidasi Bank dilakukan atas permintaan pemilik dan atau pemegang saham, dengan memperhatikan keahlian yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan likuidasi.
 - Jumlah anggota Tim Likuidasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang (di UU LPS 9 orang)
 - Salah satu anggota Tim Likuidasi yang ditetapkan oleh RUPS atau Pengadilan untuk menjabat sebagai ketua Tim Likuidasi diberi wewenang untuk bertindak mewakili Tim Likuidasi.

Lanjutan ...

- Belajar dari pengalaman likuidasi bank th 2007, dan agar kegagalan-kegagalan tidak terulang lagi, maka keanggotaan Tim Likuidasi sebaiknya terdiri dari professional yang terkait dengan ruang lingkup likuidasi badan hukum bank, seperti misalnya wakil deposan, wakil Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan wakil dari Otoritas Perbankan.
- Sehubungan dengan hal ini, diusulkan agar dalam Tim Likuidasi sebaiknya duduk orang-orang yang mempunyai keahlian tertentu yang secara nyata sangat diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan likuidasi bank. Dengan demikian Tim Likuidasi akan terdiri dari ahli hukum (*lawyer*), akuntan, penilai (*appraiser*) dan bankir yang berpengalaman operasional perbankan (*commercial banker*). Selain profesi-profesi tertentu yang dapat ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi maka perlu pula diatur jumlah anggota Tim Likuidasi.

Lanjutan ...

- Penetapan anggota Tim Likuidasi dalam praktek pelaksanaan likuidasi bank selama ini ternyata belum konsisten. Pada proses likuidasi 16 bank (a/d likuidasi bank per 1 Nopember 1997) penetapan anggota Tim Likuidasi menganut sistem perwakilan yang melibatkan anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham dan anggota Tim Likuidasi yang ditunjuk oleh otoritas perbankan. Namun dalam praktiknya, keberadaan pihak-pihak yang mewakili bank dalam Tim Likuidasi justru kontra produktif karena pengalaman menunjukkan bahwa pihak-pihak tersebut justru cenderung menghambat proses likuidasi.

Tugas Tim Likuidasi

- Sejak dibentuknya Tim Likuidasi maka segala tugas dan kewenangan pengurus/direksi, komisaris, dan RUPS (pada bank yang berbadan hukum PT atau yang dapat disamakan dengan itu pada bank yang berbadan hukum Koperasi atau Perusahaan Daerah) beralih kepada Tim Likuidasi.
- Untuk memberikan dasar hukum mengenai tugas dan kewajiban Tim Likuidasi, maka RUU Likuidasi Bank hendaknya mengatur tugas Tim Likuidasi untuk :
 - penyelidikan dan pengawasan dalam pengelolaan kekayaan Bank Dalam Likuidasi
 - penyelesaian kewajiban Bank Dalam Likuidasi
 - mendaftarkan dan mengumumkan pembubaran Badan Hukum Bank
 - melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban Bank Dalam Likuidasi
 - menentukan cara likuidasi
 - menyusun cara kerja dan anggaran

Lanjutan ...

- menyusun rencana dan melaksanakan pencairan harta kekayaan Bank Dalam Likuidasi , termasuk rencana dan cara pembayaran kepada para kreditur
- meminta akuntan publik independen untuk melakukan audit atas neraca penutupan per tanggal pencabutan izin usaha yang belum diaudit.
- menyusun neraca verifikasi
- membagikan sisa harta kepada para pemegang saham
- menitipkan bagian yang belum diambil oleh kreditur kepada bank yang disetujui Bank Indonesia
- menyusun neraca akhir likuidasi
- menyelenggarakan RUPS pada akhir pelaksanaan likuidasi
- menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia
- mengumumkan dan mendaftarkan berakhirnya likuidasi bank
- melakukan tugas-tugas lain yang dianggap perlu untuk mendukung pelaksanaan Likuidasi Bank

Kewenangan Tim Likuidasi

Agar Tim Likuidasi dapat menjalankan tugasnya secara optimal, dalam RUU Likuidasi perlu ditetapkan kewenangan-kewenangan dalam melakukan tindakan kepengurusan sebagai berikut:

- Melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan harta kekayaan dan penagihan terhadap para debiutur
- Melakukan perundingan dan pembayaran kewajiban kepada kreditur
- Mewakili Bank Dalam Likuidasi di dalam dan di luar pengadilan
- Memutuskan hubungan kerja terhadap pegawai
- Memperkerjakan pegawai sebagai tenaga pendukung Tim Likuidasi
- Meminta bantuan konsultan dalam pelaksanaan Likuidasi Bank
- Melakukan panggilan kepada para kreditur
- Meminta pengadilan untuk membatalkan segala perbuatan hukum bank, yang mengakibatkan kerugian harta bank yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum pencabutan izin usaha.
- Mengajukan gugatan atau tuntutan kepada pengurus dan atau pemegang saham bank yang turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi bank atau menjadi penyebab kegagalan bank

Lanjutan ...

- Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham dalam likuidasi;
- Mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang direksi dan komisaris Bank Dalam Likuidasi ;
- Menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan atas kekayaan milik atau yang menjadi hak Bank Dalam Likuidasi ;
- Meninjau ulang, membatalkan , mengakhiri, dan /atau mengubah kontrak yang mengikat Bank dengan pihak ketiga, yang menurut pertimbangan Tim Likuidasi merugikan Bank Dalam Likuidasi
- Menjual tagihan Bank Dalam Likuidasi kepada pihak lain tanpa memerlukan persetujuan Nasabah Debitur
- Melakukan perjumpaan utang antara piutang dan hutang Bank Dalam Likuidasi dengan piutang dan hutang nasabah penyimpan atau kreditur lainnya dalam untuk diperhitungkan dalam pelaksanaan likuidasi

Lanjutan ...

- Melakukan pengosongan atas tanah dan/atau bangunan milik atau yang menjadi hak Bank Dalam Likuidasi yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang;
- Melakukan penelitian dan pemeriksaan, untuk memperoleh segala keterangan yang diperlukan dari dan mengenai Bank Dalam Likuidasi, dan pihak manapun yang terlibat atau atau patut diduga terlibat atau patut diduga terlibat, atau mengetahui kegiatan yang merugikan Bank Dalam Likuidasi ;
- Menghitung dan menetapkan defisit yang dialami Bank Dalam Likuidasi berdasarkan Neraca Verifikasi dan membebankan kepada direksi, komisaris dan/atau pemegang saham untuk menutup defisit tersebut apabila kegagalan pencabutan izin usaha bank terjadi karena kesalahan mereka
- Melakukan tindakan-tindakan lain yang telah disetujui oleh Bank Indonesia

Tanggung Jawab Tim Likuidasi

- Mengingat bahwa Tim Likuidasi mempunyai kewenangan yang besar, maka kewenangan itu harus diimbangi dengan tanggung jawab yang besar dan pengawasan yang baik terhadap kinerja Tim Likuidasi. Tanggung jawab Tim Likuidasi meliputi :
 - 1) Pengambilalihan tanggung jawab pengelolaan dari pengurus bank sejak terbentuknya Tim Likuidasi
 - 2) Pertanggung jawaban pelaksanaan likuidasi bank
 - 3) Pertanggungjawaban secara pribadi apabila dalam melaksanakan tugasnya mengambil keuntungan untuk diri sendiri.

Prioritas Penyelesaian Kewajiban/Utang Bank Dalam Likuidasi

- Apabila suatu bank dilikuidasi maka akan timbul berbagai kreditur atas dasar hak tagih terhadap bank tersebut. Tagihan kepada bank tersebut secara garis besarnya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga golongan yaitu:
 1. Tagihan yang timbul berhubungan dengan status badan hukum dan operasionalnya dibidang perbankan, meliputi:
 - a. Pajak bank yang terutang
 - b. Pajak yang dipungut oleh bank selaku pemotong/
pemungut pajak.
 - c. Gaji pegawai yang terutang.

Lanjutan ...

2. Tagihan yang timbul karena adanya proses likuidasi, meliputi:
 - a. Biaya perkara di pengadilan
 - b. Biaya lelang yang terutang
 - c. Honorarium Tim Likuidasi
3. Tagihan yang timbul karena adanya hubungan kontraktual dan non kontraktual dengan bank sebelum bank tersebut dilikuidasi, meliputi tagihan kepada:
 - Nasabah penyimpan dana;
 - Pihak-pihak ketiga yang memperoleh manfaat dari dana simpanan, yaitu mereka yang memperoleh manfaat dari giro dan deposito yang disimpan di bank-bank yang dilikuidasi;
 - Bank-bank lain yang menempatkan dana pada bank terlikuidasi (*interbank money market*);
 - Para pengirim uang;
 - Para eksportir dan importir

Lanjutan ...

Berhubung jenis tagihan itu menimbulkan jenis-jenis pihak yang berhak memperoleh pembayaran dari hasil likuidasi bank, maka perlu diatur urutan prioritas pemenuhan kewajiban bank sebagai berikut:

Prioritas I:

- Pajak yang terutang;
- Pajak yang dipungut oleh bank selaku pemotong/pemungut pajak;
- Biaya perkara di Pengadilan
- Gaji pegawai yang terutang.
- Biaya Tim Likuidasi

Prioritas II:

- Nasabah penyimpan dana
- Kreditur lainnya sebagaimana dimaksud dalam klassifikasi kewajiban/utang
- Dalam konteks ini, peraturan dalam RUU Likuidasi kiranya dapat sejalan dengan aturan-aturan yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban LPS.

Terima Kasih

Matur Nuwun